

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

**Tabel 4.1
Sampel Penelitian**

Kriteria Sampel	Sampel
Memiliki Laporan Neraca, PAD, dan DAU dalam LKPD Kabupaten/Kota TA 2016	509
LKPD Kabupaten/Kota TA 2016 yang telah diaudit dan dipublikasi oleh BPK RI	506
Memiliki data skor EKPPD yang diterbitkan KEMENDAGRI	489
Jumlah data sampel yang dipakai dan akan diolah	486
Data Outlier	129
Jumlah data sampel yang diolah	357

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pemerintah daerah yang menjadi objek pada penelitian ini adalah semua pemerintah daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat melalui website BPK, Kemendagri, dan Kemenkeu tahun 2016.

Dalam penelitian ini objek penelitian dipilih dengan metode purposive sampling dengan ketentuan Pemda Kabupaten dan Kota yang dipilih memiliki semua data yang lengkap yang dibutuhkan: Neraca untuk mengetahui laporan

Total aset. Laporan realisasi anggaran untuk mengetahui laporan PAD dan DAU serta memerlukan laporan hasil pemeriksaan BPK. Untuk mendapatkan hasil opini audit dan jumlah temuan pelanggaran sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 542, berdasarkan metode purposive sampling yang digambarkan pada tabel 4.1 maka diperoleh sampel sebanyak 357 pemerintah daerah kabupaten dan kota.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Table 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln_TA	357	27,19	31,03	28,4540	,58955
PAD	357	,01	,47	,1040	,07972
DAU	357	,12	,85	,5136	,10348
OPINI	357	1	5	4,43	1,030
SPI	357	2	19	7,18	2,807
KNRJ	357	2,01	3,59	3,0065	,24657
Valid N (listwise)	357				

Sumber : Hasil pengolahan data

Tabel 4,2 menggambarkan deskripsi variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Rata-rata skor kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 3,0065 yang berarti rata-rata kinerja pemerintah daerah sudah bagus karena berada pada kriteria sangat tinggi. Pemerintah daerah yang memiliki

kinerja tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo dengan skor kinerja sebesar 3,5926, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Paniai dengan skor kinerja sebesar 1,0864.

Variabel ukuran daerah memiliki rata-rata logaritma natural dari total aset sebesar 28,4540. Daerah yang memiliki jumlah aset terbesar adalah Kota Surabaya sebesar 31,287 dan sedangkan yang terendah adalah daerah Kabupaten Sawah Lunto sebesar 27,194.

Variabel pendapatan asli daerah yang diukur dengan PAD menunjukkan rata-rata sebesar 0,1040 atau sebesar 10%, hal ini menunjukkan bahwa jumlah PAD pada total pendapatan pemda masih sangat kecil. Nilai PAD terbesar dimiliki oleh Kabupaten Bandung sebesar 0,8233 dan yang terkecil adalah Kabupaten Waropen sebesar 0,0065.

Variabel tingkat ketergantungan terhadap pusat yang diukur dengan DAU menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,5136 atau sebesar 51 %, hal ini menunjukkan bahwa jumlah DAU dalam total pendapatan suatu pemerintah daerah sangat besar. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang ada di Indonesia kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Nilai DAU terbesar adalah Kota Bukit Tinggi sebesar 0,8467 dan yang terkecil adalah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,0271.

Variabel opini audit diukur dari nilai opini audit yang terdapat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun 2017 yang diterbitkan oleh BPK RI. Rata-rata nilai opini audit sebesar 4,43 hal ini menunjukkan bahwa

Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia memiliki nilai opini audit yang baik. Nilai opini tertinggi adalah 5 sedangkan yang terendah adalah 1.

Variabel Sistem Pengendalian Internal pada penelitian ini diukur dengan jumlah temuan pelanggaran Sistem Pengendalian Internal yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan tahun anggaran 2016 yang diperoleh dari website BPK RI. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 7,18. Jumlah temuan pelanggaran SPI terbesar adalah Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 19 temuan, sedangkan yang terkecil terdapat 8 Kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Karimun dengan 2 temuan pelanggaran SPI.

C. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan atas model regresi yang digunakan untuk penelitian. Pengujian ini bermaksud untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta untuk mengetahui bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik dari data yang digunakan dalam penelitian;

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.

Dalam penelitian ini, alat uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov terhadap data residual regresi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat perbandingan probabilitas (p-value) yang diperoleh dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika nilai sig dari probabilitas yang diperoleh lebih besar dari 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual data menyebar normal, dan jika nilai sig lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual data tidak menyebar normal.

Tabel 4.3
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		358
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14682827
Most Extreme Differences	Absolute	,043
	Positive	,024
	Negative	-,043
Kolmogorov-Smirnov Z		,809
Asymp. Sig. (2-tailed)		,530

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,530. Berdasarkan hasil tersebut nilainya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Nugroho, 2014).

Untuk mendeteksi adanya kesamaan varian dalam data penelitian, diuji dengan meregresikan logaritma dari nilai absolute residual dengan variabel independen. Jika nilai sig diatas 5% atau 0,05 maka variabel yang dipakai menunjukkan bahwa tidak terindikasi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan sebaliknya jika nilai sig yang dihasilnya lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka varian data penelitian terindikasi gejala heteroskedastisitas

Tabel 4.4
Uji Heteroskedastisitas

Varibel	Sig.	Keterangan
Ukuran Daerah	0,635	Bebas Heteroskedastisitas
Pendapatan Asli Daerah	0,202	Bebas Heteroskedastisitas
Dana Alokasi Umum	0,167	Bebas Heteroskedastisitas
Opini Audit	0,088	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Internal	0,335	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel 4.3 di atas terlihat bahwa nilai sig. Pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Regresi yang baik adalah yang memiliki korelasi antar variabel independennya rendah. Dasar pengambilan yaitu jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.5
Uji Multikolinieritas

Variable	Tolerance	VIF
Ukuran Daerah	0,442	2,262
Pendapatan Asli Daerah	0,630	1,587
Dana Alokasi Umum	0,513	1,949
Opini Audit	0,877	1,140
Sistem Pengendalian Internal	0,954	1,048

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai tolerance dari seluruh variabel independen memiliki nilai lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF

lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi.

D. Analisis Data dan Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode pengujian analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variable independen terhadap variabel dependen.

1. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi adalah pengujian untuk melihat seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel dependennya. Untuk model regresi dengan dua atau lebih variabel independen, koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai adjusted R square ($adj R^2$). Berikut ini adalah hasil pengujian koefisien determinasi;

Tabel 4.6
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,803(a)	,645	,640	,14787	1,540

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,64 artinya variable dependen dijelaskan oleh variable independen sebesar 64% dan sisnya 36% di jelaskan oleh variable yang tidak diteliti.

2. Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat atau dependen. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh simultan jika nilai $\text{sig} < 0,05$.

Tabel 4.7
Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13,974	5	2,795	127,821	,000(a)
	Residual	7,696	352	,022		
	Total	21,670	357			

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan pengujian statistik F pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi F (0,000) yang lebih kecil dari alpha (0,05). Dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu karena nilai $\text{sig} < 0,05$.

3. Uji Hipotesis (t)

Uji nilai-t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di dalam penelitian seperti yang dinyatakan dalam hipotesis yang dipakai dalam penelitian ini. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji nilai-t juga digunakan untuk menunjukkan arah pengaruh masing-masing variabel yang dilihat dari tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen.

Kriteria dari pengujian ini adalah dengan melihat probability value (sig)-t, dimana jika sig lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau terdukung. Sebaliknya jika nilai sig lebih besar dari 5% atau 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis yang diajukan tidak terdukung.

Tabel 4.8
Uji Hipotesis

Variable	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
1 (Constant)	2,483	,598	,000
Ln_TA	-,003	,020	,867
PAD	1,447	,124	,000
DAU	-,056	,106	,594
OPINI	,126	,008	,000
SPI	-,008	,003	,004

Sumber: Hasil Pengolahan Data

a. Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian pada tabel menunjukkan variabel ukuran daerah (Ln_TA) memiliki nilai koefisien regresi -0,003 dan nilai sig. 0,867 >

alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 tidak terdukung.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian pada tabel menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai koefisien regresi 1,447 dan nilai sig. 0,000 < alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 terdukung, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian pada tabel menunjukkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai koefisien regresi -0,056 dan nilai sig. 0,594 > alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 tidak terdukung.

d. Pengujian Hipotesis 4

Hasil pengujian pada tabel menunjukkan variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki nilai koefisien regresi -0,008 dan nilai sig. 0,004 < alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 terdukung, Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

e. Pengujian Hipotesis 5

Hasil pengujian pada tabel menunjukkan variabel Opini Audit (OPINI) memiliki nilai koefisien regresi 0,126 dan nilai sig. 0,000 <

alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 terdukung, opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

E. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dengan menguji berpengaruh atau tidaknya total aset, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sistem pengendalian internal dan opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen di atas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel total aset, dan dana alokasi khusus, memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel sistem pengendalian internal terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara variabel pendapatan asli daerah dan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa total aset tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, yang

ditunjukkan dengan nilai sig dari total aset yang lebih besar dari nilai alpha. Ukuran pemda dengan aset yang tinggi tidak dapat mempengaruhi kinerja, hal ini karena aset yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan publik.

Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan (Suhardjanto et.,al 2010) menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan dan pengelolaanya. Hal ini dikarenakan daerah yang memiliki total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan yang besar dalam melaporkan pengungkapan wajib kepada publik, karena total aset yang besar juga akan diikuti dengan penyalahgunaan yang besar dan akan berdampak terhadap kinerja Pemda.

Penelitian ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan oleh (Made, et al., 2018) yang menyebutkan bahwa penyebab aset tidak berpengaruh terhadap kinerja karna adanya peran aset dalam meningkatkan kinerja pemda belum maksimal dan belum dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Sumber daya dan fasilitas yang disediakan belum memadai sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal. Aset yang dimiliki digunakan untuk tujuan selain untuk penyediaan informasi dan teknologi komunikasi serta infrastruktur untuk daerah, yang harus sangat berguna bagi masyarakat untuk mendapatkan akses dan pelayanan yang baik.

Pada dasarnya total aset mencerminkan kekayaan suatu daerah. Dimana aset daerah dapat berupa fasilitas yang ada. Di Indonesia, fasilitas yang dimiliki oleh suatu daerah akan dimanfaatkan

untuk memperoleh pendapatan asli daerah yang lebih banyak. Kusumawardani (2012) menyebutkan bahwa ukuran daerah atau total aset yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah, ini berarti semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin bagus kinerja suatu pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian, Saragih (2003) menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan penjelasan bahwa semakin tinggi pendapatan asli suatu daerah merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi positif bagi masyarakat daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi representatif dari kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi hasil pendapatan asli daerah menggambarkan kemandirian yang baik dari daerah tersebut dalam memenuhi sarana dan prasarana dengan memaksimalkan kekayaan dan potensi daerah secara maksimal. Pada dasarnya pendapatan itu bersumber dari masyarakat. Masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan dalam

pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu PAD yang ada harus digunakan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Sudarsana (2013), dan juga Wenny (2012) yang menemukan bahwa pendapatan Pemda memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Pemda.

3. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan pada pusat yang diukur melalui nilai DAU memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah. Disebutkan pada Indrarti (2011) bahwa ketergantungan daerah terhadap DAU dari pada PAD, berarti daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang rendah, ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dengan dana yang bersumber dari daerahnya sendiri karena lebih bergantung pada dana transfer dari pusat. Dengan kata lain ini juga menggambarkan bahwa pemerintah daerah belum dapat mengelola secara optimal kekayaan

yang ada di daerahnya tersebut. Pengelolaan daerah yang belum optimal menunjukkan kinerja penyelenggaraan yang belum baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar (2013) yang menyebutkan bahwa sebagian besar DAU dialokasikan untuk belanja pegawai dan hanya sebagian kecil untuk belanja modal sehingga pengembangan sarana dan prasarana fasilitas kurang maksimal. Besarnya DAU belum digunakan secara baik untuk membiayai program-program pemda. Hal ini yang diduga bahwa belanja lebih besar dari pendapatan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan pemda terhadap pusat akan menjadikan pemda yang cenderung pasif dan tidak kreatif dalam mengembangkan daerahnya, hal inilah yang menurunkan kinerja pemda itu sendiri.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) dan juga Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kinerja pemda. Berdasarkan hasil tabel analisis Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki

pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dengan nilai koefisien regresi $-0,008$ dan nilai sig. $0,004 < \alpha 0,05$.

Hasil ini sejalan dengan logika peneliti, bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan salah satu item yang diteliti oleh BPK untuk menghasilkan sebuah opini audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Sistem Pengendalian Internal yang diteliti memiliki tiga aspek besar yaitu, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern dimana dalam setiap aspek tersebut terdapat beberapa komponen SPI yang lebih rinci menjelaskan setiap pelanggaran SPI yang ada pada suatu pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan jumlah angka pelanggaran penegakan SPI terhadap 3 aspek tersebut yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK. Semakin tinggi jumlah temuan pelanggaran maka mengindikasikan lemahnya kinerja suatu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya.

5. Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis kelima pada penelitian ini adalah opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa variabel opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa

besarnya nilai opini audit oleh BPK maka menunjukkan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Made, *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan melalui opini audit memiliki efek positif yang signifikan pada transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Peningkatan transparansi sangat dibutuhkan dalam konteks fungsi pengawasan, mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan mengakibatkan gangguan. Pemerintah daerah adalah pihak yang diberikan mandat untuk mengelola dana dari masyarakat, sehingga keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dana sangat bergantung pada instansi pemerintah daerah yang melaksanakan itu (Adisasmita, 2011). Pengelolaan dana dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas didefinisikan sebagai respon masyarakat kepada pemerintah tentang tingkat kinerjanya (Pina et al., 2010).

